

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pasca lengsernya Presiden Mahmoud Ahmadinejad digantikan Hassan Rowhani setidaknya terdapat tiga perkembangan positif dalam politik luar negeri Iran pasca kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. *Pertama*, sejak Hassan Rowhani terpilih menjadi presiden Iran pada 14 Juni 2013, ia berjanji bahwa politik luar negeri Iran akan difokuskan pada upaya meredakan ketegangan yang menyelimuti masalah program nuklir Iran dengan negara-negara Barat. *Kedua*, janji itu ditepati Rowhani ketika menghadiri pertemuan dengan negara-negara P5+1 (yang terdiri dari China, AS, Jerman, Inggris, Perancis, dan Rusia). Pertemuan yang dilakukan di sela-sela Sidang Umum (SU) PBB di New York itu difokuskan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran, yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Pertemuan yang dihadiri Presiden Iran Hassan Rowhani, itu berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk segera menuntaskan masalah tersebut dalam tempo yang singkat. Rowhani sendiri menargetkan selesai dalam tempo satu tahun. Untuk menunjukkan keseriusan diplomasi Iran, Rowhani rencananya akan membawa proposal tentang nuklir Iran di pertemuan berikutnya pada 15-16 Oktober 2013 di Jenewa. *Ketiga*, dapat dilihat ketika Presiden AS Barack Obama dan Presiden Iran Hassan Rowhani melakukan pembicaraan bersejarah melalui telepon. Ini adalah pembicaraan

pertama di antara kedua pemimpin negara sejak revolusi Islam 1979. Dalam percakapan telepon itu, Obama mengatakan dia dan Rowhani menyadari tantangan yang membentang di hadapan kedua negara dan akan terus membahasnya sampai tercapai kesepakatan atas program nuklir Iran. Rowhani juga mengonfirmasi pembicaraan telepon itu melalui akun Twitter kantor kepresidenan, "di pembicaraan telepon, Presiden Rowhani dan Presiden Barack Obama menyatakan keinginan politik bersama mereka untuk bisa memecahkan masalah nuklir sesegera mungkin."¹

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini, penelitian ini mengambil judul “UPAYA PRESIDEN HASAN ROWHANI UNTUK MEMPERTAHANKAN PROGRAM NUKLIR IRAN DI TENGAH TEKANAN AMERIKA SERIKAT”

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui langkah-langkah Iran dalam mempertahankan program nuklirnya serta menelaah faktor-faktor yang menyebabkan Presiden Hasan Rowhani mampu mempertahankan program nuklirnya di bawah tekanan negara-negara Barat..

¹ Asrudin, 2013, *Menyingkap Motif Politik Luar Negeri Presiden Iran*, dalam <http://www.jaringnews.com>, diakses 1 November 2014, jam 20.45 WIB.

2. Mengkaji secara garis besar mengenai program nuklir Iran dalam konteks internasional.
3. Sebagai sarana implementasi teori-teori hubungan internasional pada kasus aktual, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional
4. Secara teoritis maupun metodologis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan Studi Timur Tengah pada khususnya.
5. Secara praktis, studi yang menggunakan pendekatan analisis wacana, akan memberikan gambaran bagaimana proses dan langkah Presiden Hasan Rowhani mempertahankan program nuklir Iran dari tekanan Amerika Serikat.

C. Latar Belakang Masalah

Program nuklir Iran di era presiden Ahmad Dinejat selalu menolak perundingan dengan negara-negara barat atau cenderung konfrontatif, tetapi perubahan dinamika politik dalam negeri Iran dengan terpilihnya Presiden Iran Hasan Rowhani sebagai Presiden Iran membuka peluang bagi negara-negara Barat khususnya Amerika untuk menekan presiden Iran Hasan Rowhani untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait program nuklir Iran. Dalam pernyataan setelah dilantik menjadi presiden ada keinginan

presiden Hasan Rowhani untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara barat dengan tujuan agar sanksi ekonomi kepada Iran dapat dicabut untuk dapat lebih meningkatkan perekonomian Iran.

Sebagaimana diketahui bahwa para arsitek nuklir Iran juga berhasil mendesain dan mengoperasikan instalasi dan reaktor air ringan di Arak. Dan walaupun sudah menguasai teknologi siklus bahan bakar dan pengayaan uranium melalui mesin-mesin sentrifugal, Iran masih berusaha menggunakan beberapa mekanisme lain untuk pengayaan uranium. Hasilnya, Iran mampu memperkaya uranium melalui sistem laser, kendati masih dalam batas laboratorium.

Keberhasilan Iran tersebut sesuai dengan aturan-aturan tentang pengembangan nuklir dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Sesuai pasal keempat Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Lebih dari itu, negara-negara yang memiliki teknologi nuklir bahkan berkewajiban membantu negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Iran kemudian juga membayar iuran tahunan keanggotaan kepada IAEA dan oleh karenanya Teheran berhak memiliki dan mengembangkan teknologi nuklir sipil.²

² “Resistensi Nuklir: Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan”, diakses pada tanggal 1 Desember 2014, tersedia pada http://www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/index_nuklir.htm

Program nuklir untuk tujuan damai merupakan hak semua negara, yang dijamin Traktat NPT. Iran menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada 1 Juli 1968. Pasal III dari Traktat NPT menyebutkan:

"Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere".³

Dalam Pasal III.1 tersebut ditetapkan, negara pihak harus menerima *safeguards* dan verifikasi yang dilakukan IAEA untuk menjamin bahwa program nuklir itu tidak dialihkan menjadi program senjata nuklir. Selain itu, berdasar Pasal III.2, negara pihak tidak diperkenankan mengupayakan penyediaan *fissile material* (uranium yang diperkaya) sendiri, kecuali dilakukan dalam kerangka *safeguards* IAEA.⁴

Program nuklir untuk tujuan damai (*peaceful purposes*) memang diperkenankan dalam Traktat NPT, khususnya Pasal IV.1. Bahkan, menurut Pasal VI.II, negara pihak justru dapat mengadakan kerja sama internasional dan bantuan teknik untuk mengembangkan program nuklirnya. Jika program

³ <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Numbers/nr201-250.shtml>, diakses 28 November 2014.

⁴ "Resistensi Nuklir: Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan", tersedia pada http://www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/index_nuklir.htm diakses pada tanggal 1 Desember 2014

nuklir itu untuk tujuan damai, dalam arti untuk energi listrik dan bukan keperluan militer (membuat bom nuklir), sebenarnya Iran berhak mengembangkannya.⁵

Keinginan Republik Islam Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai adalah dengan menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Di samping itu, Iran juga menandatangani berbagai perjanjian nuklir termasuk Konvensi Larangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT), Konvensi Larangan Perluasan Senjata Biologi (CWC), dan lain-lain.⁶

Tak seperti pada era pra Revolusi Islam, teknologi nuklir Iran pasca Revolusi sudah sepenuhnya mempribumi dan tak lagi bergantung pada luar negeri. Para arsitek Iran sudah mutlak menguasai teknologi ini sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan taraf kecanggihannya. Pasca Revolusi Islam, didukung oleh pengembangan instalasi-instalasi pembangkit nuklir serta pesatnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan iptek nuklir Iran, negara ini mulai mengupayakan terobosan untuk memasuki bidang siklus produksi bahan bakar nuklir dan berbagai aspeknya. Pada titik ini, Iran berhasil menguasai semua aspek teknologi nuklir.

Sikap Iran yang non-kompromistis dan tegas dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara yang dikategorikan penindas, hegemonis dan intervensionis, telah membuat AS semakin "gerah". AS terus

⁵ Dian Wirengjurit, "Korut, Iran, dan Nuklir untuk Perdamaian", dalam <http://kompas.com> diakses 28 November 2014.

⁶ "Resistensi Nuklir: Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan", diakses pada tanggal 1 Desember 2014, tersedia pada http://www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/nuklir/index_nuklir.htm

merongrong dan melakukan berbagai manuver untuk menjatuhkan pemerintahan Mullah Iran dan menyudutkan Iran melalui isu program senjata nuklir yang dikampanyekan AS dan provokatornya, Israel sebagai "dapat mengancam keamanan dan membahayakan perdamaian dunia".⁷

Kegagalan AS untuk menekan Rusia telah meningkatkan tekanan dan ancaman diplomatik AS terhadap Uni Eropa dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). AS telah meminta Uni Eropa dan IAEA untuk menekan Iran agar bisa membuka akses yang lebih luas untuk menginspeksi reaktor nuklirnya secara lebih cermat dan terbuka, dengan menandatangani protokol tambahan NPT (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir).⁸

Melalui berbagai inspeksi IAEA dan perundingan alot yang hingga kini terus berlangsung, terbukti bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Meskipun tekanan dan tuduhan bertubi-tubi terus dilancarkan AS terhadap Iran, Iran tetap istiqamah dan bertekad untuk terus mengembangkan energi nuklir bagi tujuan-tujuan damai. Bagi Iran, adalah hak setiap negara untuk memiliki teknologi apa pun, termasuk nuklir yang berguna bagi kemanusiaan. Pendiri Republik Islam Iran, almarhum Imam Khomeini menyatakan rebutlah teknologi dari mana pun demi kebaikan umat Islam dan manusia pada umumnya.

Tekanan Amerika Serikat (AS) dan sekut-sekutu Eropanya untuk mendesak Iran untuk menghidupkan kembali perundingan terkait program nuklirnya di era Presiden Hasan Rohani. Hal ini lantaran terinspirasi oleh

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

kemenangan Hassan Rohani dalam pemilihan presiden Iran, dan perundingan ini akan menguji posisi pemerintahan baru tersebut, demikian menurut diplomat AS dan Uni Eropa.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa di era Ahmadinejad dikenal sebagai presiden yang kerap berkonfrontasi dengan negara-negara Barat. Dalam kampanyenya, Rohani berjanji mengakhiri isolasi komunitas internasional atas Iran, dan menghidupkan kembali ekonomi negara tersebut.¹⁰

Perundingan diplomatik antara Iran dan negara-negar Barat guna menghentikan program pengembangan nuklir Iran mengalami kebuntuan sejak April. Pemerintah AS dan Eropa meyakini bahwa kebijakan nuklir Iran secara menyeluruh masih dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ulama 73 tahun tersebut menolak menyetujui konsesi selama empat tahun jalannya perundingan internasional antara Iran dan lima negara anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ditambah Jerman.

Tindakan pertama yang dilakukan Presiden Iran Hasan Rohani adalah mencabut segel yang dipasang oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahun 2005 di situs-situs reaktor nuklir Iran sebagai hasil negosiasi Iran dan IAEA untuk menghindari konfrontasi dengan negara-negara Arab, Barat-Israel. Hasil negosiasi itu, yang menghindari Iran dari sanksi ekonomi militer Barat-Israel, merupakan buah tangan Rohani. Rohani

⁹ Jay Solomon dan Farnaz Fassihi “AS, Eropa Tekan Presiden Baru Iran” dalam <http://indo.wjs.com>, diakses 18 Januari 2015. jam 20.34 WIB.

¹⁰ “Janji Rohani : Interaksi konstruktif melalui kebijakan moderat” dalam <http://www.mahdi.news.com>, diakses 18 Januari 2015. jam 20.40 WIB.

mengatakan pemerintahannya akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi "sanksi brutal" yang telah dijatuhkan terhadap Iran. "Bangsa Iran tidak melakukan sesuatu yang salah dan pantas mendapatkan sanksi tersebut. Sanksi itu merupakan alat yang usang dan ekonomi Barat akan merugi sendiri lebih dari gejolak dari yang dialami Iran. Rohani, mengatakan Iran akan mengatur agar sanksi menjadi reda dan menunjukkan "transparansi" guna "membangun kepercayaan" dari dunia. Program Energi Nuklir Iran benar-benar transparan, kami siap untuk menunjukkan transparansi dan kami siap membuat seluruh dunia menjadi jelas bahwa tindakan yang diambil oleh Republik Islam Iran benar-benar dalam kerangka kerja internasional.¹¹

Hassan Rohani mengatakan, Amerika Serikat harus mengakui semua hak Iran, termasuk mengembangkan program nuklir. "Setiap dialog dengan Amerika Serikat harus didasari kesetaraan, sikap saling menghormati, dan sejumlah syarat. Amerika Serikat tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Iran, mengakui hak-hak Iran, termasuk hak mengembangkan nuklir, serta menghentikan kebijakan unilateral dan tekanan politik. Pemerintahan (Iran) selanjutnya tak akan menyerahkan hak-hak legal negeri ini.¹²

Hasan Rouhani menyatakan "Dalam program nuklir kami, pemerintah terlibat secara penuh dan memiliki wewenang penuh. Masalah tidak akan muncul dari pihak kami. Kami memiliki kebebasan politik untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Presiden Iran Hassan Rohani mengatakan ia memiliki otoritas penuh untuk menegosiasikan kesepakatan

¹¹ Ibid

¹²<http://internasional.kompas.com/read/2013/06/17/23214471/Hassan.Rohani.AS.Harus.Akui.Hak.Nuklir.Iran>

dengan Barat atas program energi nuklir Republik Islam Iran. Rohani juga menegaskan, Tehran tidak mencari senjata nuklir. "Di bawah kondisi apa pun, kami tidak akan mencari senjata pemusnah massal apapun, termasuk senjata nuklir, tidak akan pernah. Kami tidak pernah mengejar atau menciptakan bom nuklir, dan kami tidak akan melakukan itu. Rohani menyatakan, pihaknya hanya memiliki satu tujuan dengan program nuklir yang dimilikinya. "Kami mencari teknologi nuklir yang damai."¹³

D. Pokok Permasalahan

Bagaimana upaya Presiden Hasan Rowhani untuk mempertahankan program nuklir Iran di tengah tekanan Amerika Serikat?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan sikap Iran yang menentang permintaan Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklirnya serta tetap mempertahankan pendirian untuk meneruskan upaya pengayaan uranium, penulis menggunakan Tipologi Politik Luar Negeri dan Teori Diplomasi.

1. Tipologi Politik Luar Negeri

Berbagai proposisi teoretik yang kita kenal dalam ilmu sosial sebenarnya memiliki kadar teoretik yang bervariasi. Dan berdasar kadar teori yang dimuatnya, kita bisa memilah proposisi-proposisi itu ke dalam tiga tingkatan: sistem klasifikasi (tipologi atau taksonomi), kerangka konseptual, dan sistem teoretik (teori). Salah satu tingkatan tersebut, yaitu

¹³ <http://www.islamtimes.org/id/doc/news/303330/rohani-iran-tak-akan-pernah-bangun-senjata-nuklir>

tipologi atau taksonomi bisa berfungsi penting dalam proses pembentukan teori. Tipologi sebenarnya adalah sistem klasifikasi atau sistem kategori, bukan sistem teoretik. Tipologi terdiri dari sistem kategori yang mengorganisasikan hasil pengamatan sehingga hubungan antar kategori-kategori itu bisa dideskripsikan. Suatu tipologi punya hubungan dekat dengan dunia empirik, dan dalam pengertian ini kategori-kategori dalam tipologi itu mencerminkan realitas yang dideskripsikan.

Tujuan tipologi adalah membuat skema yang tertib untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan fenomena. Tipologi atau taksonomi umumnya tidak berfungsi eksplanasi. Ini adalah sarana deskripsi. Tipologi hanya mendeskripsikan fenomena empirik dengan mencocokkan fenomena itu dengan kategori-kategori yang ada dalam tipologi itu.

Dalam kasus nuklir Iran, sikap Iran untuk mempertahankan program nuklirnya di tengah tekanan Amerika Serikat dapat dijelaskan dengan menggunakan salah satu tipologi politik luar negeri yang dikemukakan oleh John Lovell. Dari tipologi politik luar negeri ini dapat diidentifikasi posisi yang diambil oleh Iran di antara alternatif-alternatif keputusan politik luar negerinya.

Tipologi strategi politik luar negeri yang dibuat oleh John Lovell ini juga mendorong kita untuk berteori bahwa tipe strategi yang diambil oleh suatu negara bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri. Terdapat empat dimensi, yang setelah dipertemuskan menghasilkan empat tipe strategi: konfrontatif, memimpin (*leadership*), akomodatif, dan konkordan.

Gambar 1. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

		PENILAIAN TENTANG STRATEGI LAWAN	
		Mengancam	Mendukung
PERKIRAAN KEMAMPUAN SENDIRI	Lebih Kuat	Konfrontasi	Memimpin
	Lebih Lemah	Akomodasi	Konkordans

Sumber: John Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (Holt, Rinehart, Winston, 1970), hal. 99.¹⁴

Argumen dari tipologi ini adalah bahwa perbedaan di antara berbagai strategi politik luar negeri berkaitan dengan perkiraan kemampuan sendiri dan penilaian tentang strategi lawan. Dengan memilah dua dimensi perkiraan kemampuan sendiri dan penilaian tentang strategi lawan dan mempertemu-silangkan keempat dimensi itu, didapatkan empat tipe strategi politik luar negeri.

Dengan memperhatikan tipologi ini, dapat segera diketahui arah hubungan antara konsep-konsep tersebut. Tipologi ini kemudian menghasilkan penjelasan bahwa sikap Iran yang mempertahankan program nuklirnya di tengah tekanan Amerika Serikat merupakan bentuk strategi politik luar negeri yang berada di antara “konfrontasi” dan “akomodasi” di tengah tekanan Amerika Serikat melalui IAEA maupun Dewan Keamanan-PBB.

Dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, strategi politik luar negeri Iran tidak kemudian “konfrontatif”; yaitu membalas tekanan

¹⁴ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologim* Yogyakarta: LP3ES, 1990, hal. 190

Amerika Serikat dengan tekanan dan ancaman pula atau bahkan kekuatan militer. Sikap Iran juga tidak “akomodatif”; Iran juga tidak menerima dan tunduk atas tekanan dan permintaan Amerika Serikat untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya.

Sikap Iran yang cenderung “bertahan” tersebut merupakan hasil penilaian atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap cenderung “mengancam” dan perkiraan atas kemampuan Iran sendiri yang tidak merasa “lebih kuat”; yang menjadikannya “konfrontatif” dan juga tidak merasa “lebih lemah”; yang menjadikannya “akomodatif”.

Dari penjelasan tersebut, didapatkan bahwa upaya Iran untuk mempertahankan program nuklirnya adalah dengan menerapkan strategi politik luar negeri yang “bertahan” dari tekanan Amerika Serikat agar menghentikan program nuklirnya. Alternatif strategi yang “akomodatif” jelas hanya menuruti kemauan Amerika Serikat dan mengakui bahwa kemampuan Iran “lebih lemah” dari Amerika Serikat; dan hasilnya program pengayaan uranium di Iran akan berakhir. Alternatif strategi politik luar negeri yang “konfrontatif” juga akan menunjukkan permusuhan terbuka yang akan membangkitkan amarah aliansi negara-negara Barat yang justru akan merugikan Iran.

Sikap “defensif” tersebut dilakukan oleh Iran yang memiliki keyakinan akan kekuatan yang dimilikinya, terutama dasar hukum Perjanjian dengan IAEA serta hasil inspeksi IAEA yang menjadi senjata

untuk menangkis tekanan-tekanan Amerika Serikat; tanpa perlu bersikap “konfrontatif” atau bahkan “akomodatif”.

Di era kepemimpinan baru Presiden Hassan Rohani, Iran mulai akomodatif dengan kooperatif dengan dunia internasional yang ingin Iran transparan soal program nuklirnya itu. Dalam hal ini, Rohani ingin keterbukaan Iran terkait nuklirnya itu bisa menghapus sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan PBB. Menurut Presiden Rohani, dia sangat mendukung kelanjutan perundingan nuklir Iran karena itu merupakan salah satu cara untuk menuntaskan masalah nuklir Iran dan juga untuk mengakhiri sanksi ekonomi.¹⁵

2. Konsep Diplomasi

The Oxford English Dictionary memberi konotasi diplomasi yaitu: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan wakil; bisnis atau seni para diplomat.”¹⁶ Menurut *the Chamber’s Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah “the art of negotiation, especially of treaties between states; political skill.” (seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik).¹⁷ Di sini, konotasi yang pertama menekankan pada kegiatannya, sedangkan konotasi yang kedua meletakkan penekanan pada seni berundingnya.

¹⁵ *Akomodatif Terhadap Solusi Nuklir Iran, Presiden Rohani Ingin Sanksi Ekonomi Segera Dicabut*, dalam <http://www.an.najah.net>. Diakses 19 Januari 2015. jam 20.54 WIB.

¹⁶ S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 2

¹⁷ *Ibid.*

Menurut Harold Nicholson, kata diplomasi menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda.¹⁸ Dari kelima hal tersebut, empat hal yang pertama menyangkut: (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri. Ia selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik.

KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan, “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.”¹⁹ Ivo D. Duchacek berpendapat, “Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.”²⁰ Tetapi diplomasi kadang-kadang juga dihubungkan dengan perang. Oleh karena itulah Clausewitz, seorang filosof Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal mengatakan bahwa perang merupakan kelanjutan diplomasi dengan melalui sarana lain.

Para pakar meletakkan tekanan pada keterkaitan antara negosiasi dan diplomasi. Negosiasi berarti bahwa terdapat suatu usaha untuk

¹⁸ Harold Nicholson, “Diplomacy”, London: 1942, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 3

¹⁹ K.M. Panikkar, “The Principles and Practice of Diplomacy”, Bombay, 1957, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995., hal. 3

²⁰ Ivo D. Duchacek, “Conflict and Cooperation Among Nations”, New York, 1961, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995., hal. 4

mencapai kesepakatan satu sama lain antara dua pihak yang bersengketa yang sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur antara para diplomat dan negarawan. Pada bagian lain. Maksud dari konferensi bilateral maupun internasional adalah untuk memelihara hubungan-hubungan politik maupun non politik yang akan meningkatkan nilai-nilai bersama. Konferensi juga memungkinkan untuk diarahkan kepada usaha untuk mengurangi polemik politik atau memperoleh kesempatan untuk mempelajari usul-usul pihak lain, apabila mungkin, dan untuk menyiapkan dasar-dasar bagi penyelesaian masalah yang menonjol pada saat itu.

Dari definisi-definisi yang telah disebut di atas, beberapa hal tampak jelas. *Pertama*, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah *negosiasi*. *Kedua*, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga*, tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. *Keempat*, diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. *Kelima*, diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. *Keenam*, diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara. *Ketujuh*, diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa “diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-

cara damai, apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.²¹ Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.”²²

Ada beberapa tipe diplomasi yang dipraktekkan oleh negara sebagai aktor internasional. Dalam diplomasi terdapat konsep *conference diplomacy* yaitu perundingan diplomatik multilateral dalam skala luas yang dilakukan melalui pertemuan internasional. Konferensi diplomasi ini bersifat “terbuka”, berbeda dengan diplomasi “rahasia”. Konferensi diplomasi yang bersifat multilateral membantu membuka keluhan, mengungkapkan masalah, menukar pandangan dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan bersama. Sebagai sebuah mekanisme untuk menyelenggarakan hubungan internasional, konferensi diplomasi bukan merupakan sebuah persetujuan yang mampu memberikan jaminan. Teknik konferensi diplomasi dapat mendorong pemecahan masalah manakala kepentingan nasional tidak dapat diselesaikan oleh forum pembicaraan dan perundingan yang telah disediakan.²³

Kemudian terdapat konsep *parliamentary diplomacy*, yaitu sebuah bentuk konferensi diplomasi yang menekankan upaya persetujuan melalui asas mayoritas di dalam lembaga internasional. Terminologi ini mengungkapkan proses politik serupa yang berlangsung di Majelis Umum

²¹ Richard W. Sterling, “Macropolitics”, New York, 1970, dalam S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995., hal. 5

²² S.L. Roy, *Ibid.*, hal. 5

²³ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin, 1990, hal. 199

dan badan internasional lainnya serta parlemen nasional. Diplomasi parlemen memberikan perhatian terhadap manuver berbagai kelompok regional serta kelompok yang memiliki kepentingan khusus yang menyerupai sidang legislatif, dan tuntutan terhadap dewan nasional.²⁴

Diplomasi parlementer berfungsi untuk menetapkan masalah, memfokuskan perhatian, dan mengkonsolidasikan titik pandang, namun tidak secara otomatis mengarah pada pemecahan masalah pada peringkat internasional. Pesertanya adalah perwakilan diplomatik negara berdaulat yang berfungsi sebagai delegasi dan ditunjuk tanpa memiliki kebebasan menjalankan atau membuat keputusan.

Kemudian juga ada konsep *summit diplomacy*, yaitu diplomasi pribadi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang berbeda dengan diplomasi peringkat duta besar atau duta. Diplomasi tingkat tinggi sebagai sebuah mekanisme untuk menjalankan hubungan internasional bersifat sangat dramatis namun tidak menjamin keberhasilan yang lebih baik dibandingkan jenis diplomasi lain. Diplomasi tingkat tinggi dapat membentuk kesepakatan dalam bidang yang lebih luas, dan meninggalkan rinciannya untuk dikerjakan oleh diplomat yang peringkatnya berada di bawah kepala negara, atau diplomasi seperti ini dapat juga menembus kebuntuan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah.²⁵

²⁴ *Ibid*, hal. 207

²⁵ *Ibid*, hal. 211

Secara teoritis substansial, apa yang dilakukan oleh Iran adalah pengejaran kepentingan praktis dan menempatkannya sebagai prioritas politik luar negeri utama masing-masing negara. Secara sederhana, kepentingan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku yang berorientasi suatu negara.

Dalam kasus nuklir Iran, dapat dilihat bahwa Iran menggunakan jalur diplomatik untuk tekanan dari Barat yang menggunakan instrumen IAEA sebagai alat organisasi internasionalnya. Konsep-konsep diplomatik dilakukan oleh pihak Iran dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan program nuklirnya sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan kemanusiaan. Persoalan kontroversi nuklir Iran tersebut muncul karena timbulnya kekhawatiran Barat terhadap kepemilikan nuklir oleh negara-negara yang notabene berseberangan dengannya. Di belahan dunia manapun stabilitas keamanan (*security preservation*) adalah masalah yang paling krusial di dalam kelangsungan eksistensi hegemoni sebuah negara.

Namun demikian, pada dasarnya persoalan penentangan program nuklir Iran tidak mempengaruhi status diplomatik Iran; seperti pemutusan hubungan diplomatik atau pernyataan perang antara kedua belah pihak. Dimana bahwa pihak Iran lebih menginginkan proses penyelesaian secara damai. Sehingga langkah-langkah diplomatik yang dilakukan Iran untuk mempertahankan program nuklirnya antara lain dengan melakukan *negosiasi* yang dilaksanakan oleh perwakilan negara. Iran melakukan

perundingan dengan mengajukan bukti-bukti yang ada bahwa program pengayaan uranium Iran sepenuhnya bertujuan kemanusiaan dan perdamaian.

Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri serta pelaksanaannya. Dalam pengertian ini diplomasi sama dengan politik luar negeri. Dalam artian yang terbatas, diplomasi mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi.

Dalam upaya untuk mempertahankan program nuklirnya ditengah penentangan dunia Barat, Iran melalui upaya diplomasi atau jalur resmi berusaha mencapai kepentingannya dengan mematuhi peraturan-peraturan internasional yang resmi dan sah. Pemerintah dan rakyat Iran tak pernah mundur dalam mempertahankan haknya di bidang nuklir sipil sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, Piagam Badan Energi Atom Internasional (IAEA), serta prinsip kedaulatan nasional Iran sendiri. Diplomasi terbuka dan resmi yang dilakukan oleh Iran menjadikan pelindung legalitas pengembangan program nuklir di negaranya.

F. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan sementara: Bahwa Presiden Hasan Rowhani mampu bertahan untuk tidak tunduk

terhadap tekanan negara penentang nuklir yaitu melalui *conference diplomacy* yaitu dengan perundingan diplomatik multilateral dalam skala luas yang dilakukan melalui pertemuan internasional dan *summit diplomacy*, yaitu diplomasi pribadi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yaitu pembicaraan antara Hasan Rowhani dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi permasalahan penentangan program nuklir Iran dan upaya-upaya bagaimana Iran mampu mempertahankannya. Rentang waktu atau batasan penelitian adalah dari tahun 2013 sejak dilantikannya Presiden Hasan Rowhani menjadi presiden Iran hingga tahun 2015 ketika Iran masih mampu bertahan dari tekanan penghentian program nuklirnya.

H. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal,

majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet serta sumbangsih dunia pers yang terhimpun lengkap pada koleksi kliping koran yang memuat berita maupun komentar tentang subjek yang penulis pilih.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini menguraikan tentang kondisi Republik Islam Iran di Era Presiden Hasan Rowhani yang akan menguraikan tentang Republik Islam Iran Sebagai Negara Pengembang Nuklir meliputi Karakter Nasional Republik Islam Iran dan Perkembangan Teknologi Nasional dan perjanjian dengan IAEA serta kebijakan Presiden Iran Hasan Rowhani terkait pengembangan nuklir Iran yang lebih kompromis.

BAB III Bab ini menguraikan tentang program nuklir Iran di tengah tekanan-tekanan Barat. Juga diuraikan tentang upaya-upaya yang dilakukan Barat serta bentuk-bentuk tekanan untuk menghentikan program nuklir Iran.

BAB IV Bab ini akan menjabarkan bagaimana upaya Presiden Hasan Rowhani dalam menerapkan strategi diplomasi untuk kepentingan nasional Iran yaitu mempertahankan program nuklir yang bertujuan damai.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.